

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses berkelanjutan, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Banyak pendapat tentang perencanaan pembangunan, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Siagian (1983:18) menurutnya perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan. Sementara itu menurut Pariata Westra (1982:26) dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi, perencanaan adalah:

“Aktivitas pokok dalam manajemen yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perkerjajaan perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajer, disamping fungsi - fungsi pokok lainnya, yaitu penggerakan dan pengontrolan.”

Namun perencanaan dikemukakan oleh Soul M. Ketz dalam Tjokroamidjojo (1987:17), bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu:

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin

dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (the best combination)
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan - urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e. Dengan adanya rencana maka ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Memperhatikan pendapat di atas dapat ditarik pengertian bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu rencana merupakan pemikiran-pemikiran ke depan secara matang yang mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian, tujuan tersebut dilakukan satu himpunan pengambilan keputusan.

Sedangkan definisi perencanaan menurut N. Rode and De Smit dalam Syafrudin (1993:3):

“Perencanaan adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan dan merumuskan pengambilan keputusan-keputusan di kemudian hari. Perencanaan mencakup perumusan tujuan-tujuan tertentu serta mencakup langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan musyawarah dengan pihak pimpinan yang bersangkutan. Perencanaan adalah memberi bentuk kepada situasi (yang akan datang), untuk mencapai hal tersebut harus dirincikan secara jelas keinginan-keinginan yang ada serta harus ditetapkan sasaran-sasaran yang dikehendaki, jadi dengan demikian harus dirumuskan problem-problem yang bersangkutan dengan hal itu. Perencanaan juga berarti penataan kembali rencana, pengendalian tambahan atas tindakan-tindakan pelaksanaan berdasarkan evaluasi (secara berkesinambungan) tersebut diatas, serta melakukan pengendalian tambahan terhadap cara menyusun rancangan-rancangan tersebut. Jadi perencanaan itu merupakan suatu proses yang bersifat adaptif.”

Sedangkan arti sebuah perencanaan menurut Faludi dalam Syafrudin (1993:5) “merumuskan program-program untuk bertindak.” Dalam sebuah perencanaan dalam merumuskannya terdapat beberapa ciri-ciri konsep yang

digunakan untuk merumuskan masa depan, Faludi dalam Syafrudin (1993:13) telah menyusun sebuah kerangka klasifikasi yang membedakan tiga dimensi dalam tipologi perencanaan, yang masing-masingnya diberi penamaan menurut nilai-nilai ekstrem dimensi yang bersangkutan, yaitu:

- a. Perencanaan cetak biru berhadapan dengan perencanaan proses: Sampai seberapa jauhkah bisa dilahirkan suatu perencanaan sebagai hasil dari pendekatan secara ketat yang berasal dari tradisi teknologi.
- b. Perencanaan beruang lingkup rasional berhadapan dengan perencanaan secara terurai - inkrementalis (meningkat): Sampai seberapa jauhkah suatu perencanaan bisa bersifat mirip dengan ideal yang rasional.
- c. Perencanaan normatif berhadapan dengan perencanaan fungsional: Apakah sasarannya sudah bersifat pasti/tak berubah sehingga hanya bisa dilakukan pilihan mengenai peralatannya, atautkah sasarannya juga bisa dipilih-pilih.

Dari penjelasan para ahli diatas, maka dapat disimuplkan secara umum bahwa pengertian perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

2. Tahap dalam Perencanaan

Dalam sebuah proses perencanaan ada beberapa tahapan menurut Dusseldorp dalam Sjafrudin (1973:27), tahapan yang pertama yaitu rumusan masalah, dilanjut dengan pengumpulan dan pemeriksaan bahan, penyusunan rencana, penetapan rencana, dan tahapan terakhir adalah melaksanakan dan menilai hasilnya. Dalam tahap- tahap tersebut kecuali sebagian dari tugas untuk merumuskan sasaran-sasaran seperti pembuatan perencanaan dan sebagian penilaian, dimasukkan kedalam proses perencanaan. Kemudian pembuatan rencana dapat dibagi dalam 7 bagian (Sjafrudin, 1973:28):

- a. Perencanaan harus dimulai dengan melakukan analisa terhadap situasi yang sedang terjadi dan mengukur terhadap sasaran-sasaran yang harus dicapai kedepannya.
- b. Selanjutnya yaitu menentukan program aksi yang mana akhirnya dapat dilaksanakan pada situasi yang sedang terjadi untuk mencapai sasaran tersebut. Ditetapkan dalam tahap yang terdahulu disarankan untuk membuat alternatif program bagi rencana-rencana yang terbentuk.
- c. Langkah selanjutnya yaitu penentuan waktu dan metode yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dari tiap-tiap program.
- d. Berbagai program aksi lebih dianjurkan ditinjau dari latarbelakang dan situasi yang sedang terjadi. Sekaligus memperhitungkan alat-alat yang tersedia dan periode yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
- e. Pemeliharaan haruslah dibuat diantara program-program yang optimal dan praktis.
- f. Dalam keadaan-keadaan umumnya sejumlah program aksi yang diwujudkan bersama-sama dalam sebuah rencana, haruslah diintegrasikan.
- g. Hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah terhubung oleh bagian terdahulu harus diuraikan secara jelas dalam laporan yang mencakup pula tujuan analisa singkat mengenai situasi yang terjadi sekarang serta program pelaksanaan yang tepat.

Koordinasi dalam perencanaan, ada beberapa prinsip dalam koordinasi ini

tentunya dalam sebuah perencanaan sangatlah penting untuk melakukan koordinasi

dengan tingkat pusat maupun tingkat regional, prinsip-prinsip tersebut antara lain

(Sjafrudin, 1973:44):

- a. Pemerintah pusat harus menetapkan petunjuk-petunjuk tentunya melalui peraturan sebagai prosedur-prosedur dalam tahapan perencanaan.
- b. Pembentukan panitia-panitia gabungan lokal maupun regional dengan wakil-wakil lokal, regional dan pemerintah pusat dan dengan staf teknis.
- c. Pembentukan panitia-panitia kerja untuk menjamin terbentuknya pengertian antar ahli, seperti ahli politik, ahli teknik, dan khalayak ramai untuk menimbulkan dan melatih suasana "*team spirit*".
- d. Penggunaan media penghubung masyarakat sangat ditekankan pada setiap tahap perencanaan.

Dari penjabaran para ahli diatas, maka dapat digariskan secara umum

terdapat beberapa tahapan yang dilakukan baik melalui peraturan dan prosedur

yang sudah ditetapkan, dan dilakukan baik secara teknis maupun sampai ranah politik serta memperhatikan segi sosial masyarakatnya.

B. Teori Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Siagian (1983:2) mendefinisikan Pembangunan yaitu: “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju. Apabila definisi di atas dijabarkan lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang terkandung didalamnya sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1983:3).

Pembangunan mutlak harus terjadi jika suatu negara ingin mengarah kepada kemajuan. Pembangunan segala bidang menuju perubahan yang lebih baik tentunya. Menurut Kartasmita (1997:9) pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat maju maupun masyarakat sedang berkembang. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi yang

lebih baik, secara materiil maupun sprituil. Sehingga pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan (Munir, 2002:24-25).

Muchdie (2001:3-4) mengemukakan bahwa pembangunan atau pengembangan dalam arti *development*, bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya, dalam hal ini penduduk setempat. Sebaliknya, pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna meningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain.

Pembangunan pada dasarnya adalah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang. Secara umum proses ini dimulai dari perencanaan, disusul pelaksanaan, dan diakhiri dengan pengendalian. Berbagai teori pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, muncul untuk menjawab masalah ini (lingkaran kemiskinan) yang kesemuanya fokus kepada upaya mendorong investasi, misalnya teori Henry C. Brutton yang menganjurkan pemerintah di negara berkembang untuk meningkatkan tabungan melalui dorongan modal, rangsangan langsung, kesempatan investasi, dan mengenalkan lembaga keuangan.

2. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan menurut Tjokrowinoto sebagai mana dikutip oleh Ulum (2013) pergeseran paradigma pembangunan merentang mulai dari paradigma pertumbuhan, paradigma kesejahteraan, paradigma neo-ekonomi, paradigma dependensia, hingga paradigma pembangunan manusia. Sedangkan menurut Suryono (2010) paradigma pembangunan yang pertama adalah

paradigma pertumbuhan. Paradigma pertumbuhan adalah paradigma yang memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Paradigma ini berhasil meningkatkan kapital dan pendapatan perkapita Negara berkembang. Selanjutnya paradigma pertumbuhan pemerataan. Paradigma ini digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar yang apabila digunakan tersendiri atau dalam kombinasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan golongan miskin. Keempat pendekatan itu (1) meningkatkan laju pertumbuhan GNP dengan meningkatkan tabungan; (2) mengalihkan investasi kepada golongan miskin; (3) mendistribusikan pendapatan kepada golongan miskin; (4) pengalihan harta kepada orang miskin.

Paradigma selanjutnya yaitu paradigma teknologi tepat guna. Paradigma ini beranggapan bahwa perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara menciptakan barang – barang produksi melalui cara yang lebih bersifat padat karya sehingga tepat apabila diterapkan di Negara berkembang. Kemudian paradigma kebutuhan dasar pembangunan. Paradigma ini menyediakan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya sandang, papan, pangan tetapi kebutuhan lainnya.

Pergeseran paradigma selanjutnya adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini memiliki fokus mewujudkan keseimbangan pembangunan antar sektor ekonomi, social, dan lingkungan. Melihat paradigma pembangunan diatas dalam pembangunan ekonomi untuk saat ini paradigma yang paling tepat adalah paradigma berkelanjutan. Hal ini dikarenakan paradigma berkelanjutan memiliki keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Melihat paradigma pembangunan diatas dalam pembangunan ekonomi untuk saat ini paradigma yang paling tepat adalah pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut paradigma berkelanjutan memiliki keseimbangan antara kegiatan ekonomi, dampak social, dan keseimbangan lingkungan. Lingkungan dan social tidak lagi hanya sebagai objek melainkan sebagai perhatian untuk dijaga dan dilestarikan. Paradigma ini juga memiliki maksud bahwa keseimbangan ketiga hal tersebut dapat dijadikan harapan untuk kehidupan dimasa mendatang.

C. Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu proses perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat, pemerintah, lingkungan, dalam suatu wilayah atau daerah dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, serta sesuai pada azas prioritas. Perencanaan pembangunan dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Menurut Albert Waterson dalam Tjokroamidjojo (1989:12) adalah:

- a. Perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”.
- b. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang tak

terbatas adanya, untuk mencapai tujuan tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efesien dan efektif.

Proses perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi 2 pendekatan sistem dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Pendekatan *top-down* pada dasarnya menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Pendekatan *top-down* identik dengan *command and control* (keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan). Dua proses pendekatan disebut oleh Kartasmita (1997:114-115) termasuk kelompok perencanaan secara hierarki penyusunan. Menurut Kartasmita perencanaan secara *bottom-up* merupakan penjabaran dari rencana induk kedalam rencana rinci. Rencana rinci tersebut merupakan penjabaran dari rencana induk tersebut. Sedangkan proses perencanaan yang dilakukan dari bawah keatas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan pendekatan ini timbul karena proses penyusunan perencanaan dilakukan dengan mengenali kebutuhan masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan dampak dari kegiatan yang direncanakan.

D. Perencanaan Strategis

Strategis secara umum merupakan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategis berasal dari kata Yunani yaitu *strategisa*. Menurut Tjiptono (1997:3), secara etimologis strategis merupakan gabungan dari kata

stratos yang berarti militer dan *ag* yang berarti memimpin. Dari kedua kata tersebut tersebut dapat diartikan jika strategis merupakan ilmu atau seni untuk menjadi jenderal. Seiring perkembangan zaman istilah strategis tidak hanya digunakan pada bidang militer saja, banyak organisasi juga menggunakan istilah strategis untuk menyusun rencana dalam mencapai tujuan. Dari pendapat yang disampaikan oleh Tjiptono di atas, dapat disimpulkan bahwa strategis merupakan suatu rencana yang dirumuskan oleh pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.

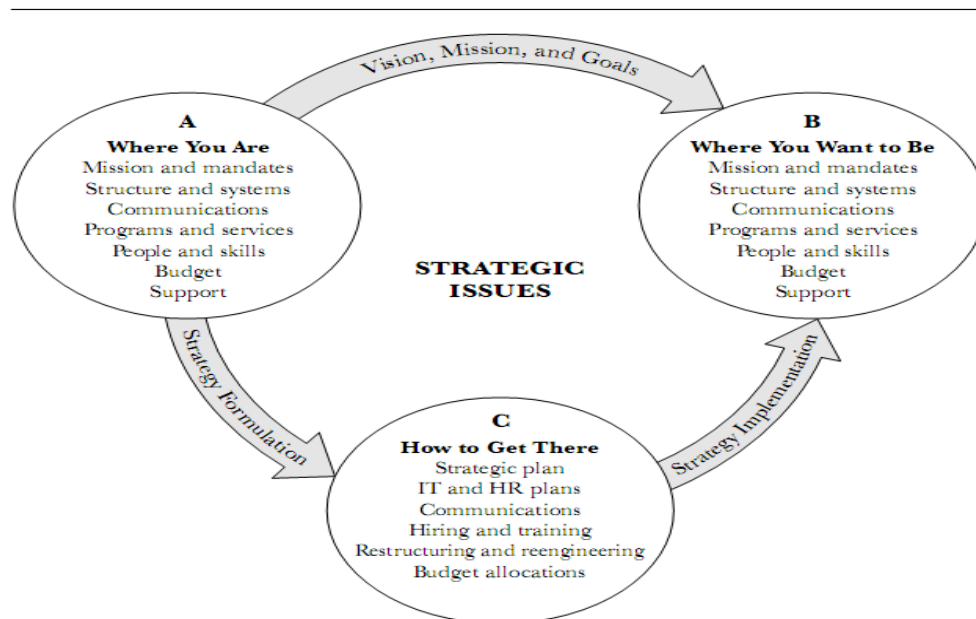
Seiring berkembangnya zaman konsep mengenai strategis sendiri juga ikut berkembang. Menurut Reksohadiprodjo (2000:41) strategis adalah:

“Fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen mencapai tujuan. Strategis adalah rencana menyatu, komprehensif dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategis badan usaha dengan kesempatan serta ancaman yang datang dari luar. Menyatukan adalah memadukan bagian–bagian, jadi tidak parsial; holistik sifatnya dan berupa kegiatan sistem keseluruhan. Komprehensif berarti melingkupi segala aspek dan keterpaduan berarti bagian–bagian dijadikan serasi.”

Kutipan diatas menjelaskan bahwa strategis merupakan susunan rencana yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhi rencana, aspek-aspek yang mempengaruhi bisa merupakan ancaman ataupun kesempatan yang datang dari luar. Perencanaan strategis merupakan salah satu bidang studi yang banyak dipelajari secara serius. Hal ini disebabkan karena setiap saat terjadi perubahan, seperti persaingan, peningkatan inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan kondisi demografis dan lain-lain. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut dibutuhkan perencanaan strategis. Perencanaan strategis dianggap penting, seperti yang disampaikan Olsen dan Eadie di dalam Bryson (2004 : 6) “*Strategisc planning as a disciplined effort to*

produce fundamental decisions and actions that shape and guide what an organization (or other entity) is, what it does, and why it does it.” Penjelasan yang dikemukakan oleh Olsen dan Eadie berarti perencanaan strategis sebagai upaya disiplin untuk menghasilkan keputusan dasar dan tindakan yang membentuk dan mengarahkan organisasi (atau kesatuan yang ada di dalamnya), apa yang dilakukannya, dan mengapa melakukannya.

FIGURE 1.1. THE ABCS OF STRATEGIC PLANNING.



Gambar 2. ABC Dari Perencanaan Strategis

Sumber: Bryson (2004:7)

Konsep diatas merupakan ABC dari perencanaan strategis. Dari kolom A ke C adalah proses formulasi dari perancangan strategis, sedangkan C ke B adalah implementasi dari strategis itu sendiri. Untuk membuat perencanaan strategis yang baik harus mencari tahu A, B, dan C dan bagaimana menghubungkannya. Prinsipnya adalah memahami isu dari A, B, C dan keterkaitannya harus tersampaikan dengan efektif. Singkatnya perencanaan strategis satu hal yang

berdiri sendiri tetapi kumpulan dari konsep, prosedur dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Pendapat mengenai definisi perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Hughes dalam Riyadi dan Brantakusumah (2004:280) menyatakan bahwa *“strategisc planning is a discipline effort produce fundamental decisions, shaping the nature and direction of govermental activities, within constitutional bounds.”* Yang mempunyai maksud bahwa perencanaan strategis meliputi kegiatan perumusan tindakan- tindakan penting sebagai panduan organisasi serta upaya membangun keterlibatan *stakeholder* dalam mewujudkan tujuan organisasi. Perencanaan strategis perlu diterapkan pada sebuah organisasi untuk melihat atau mendeteksi kondisi yang mungkin tidak baik untuk masa depan dan memandu arah kebijakan yang sudah ditetapkan.

Perencanaan strategis adalah tentang membuat rencana untuk mengimplementasikan strategis. Menurut Minzberg yang dikutip oleh Conway (2004:1) kebutuhan organisasi untuk merencanakan dan mengawasi aktifitas dalam rangka untuk fokus pada sumber daya, usaha dan bertahan dimasa mendatang. Seiring dengan perkembangan perencanaan strategis, memunculkan para praktisi dan konsultan tentang perencanaan strategis.

Perencanaan strategis biasa diartikan sebagai perencanaan yang mencakup tiga tahap dari pembentukan strategis, pengambilan keputusan dan implementasinya. Seperti mempertimbangkan untuk memilih strategis yang digunakan kedepannya, mengambil keputusan strategis yang dipilih dan mengimplementasikan strategis tersebut (Conway, 2004:1). Menurut Conway

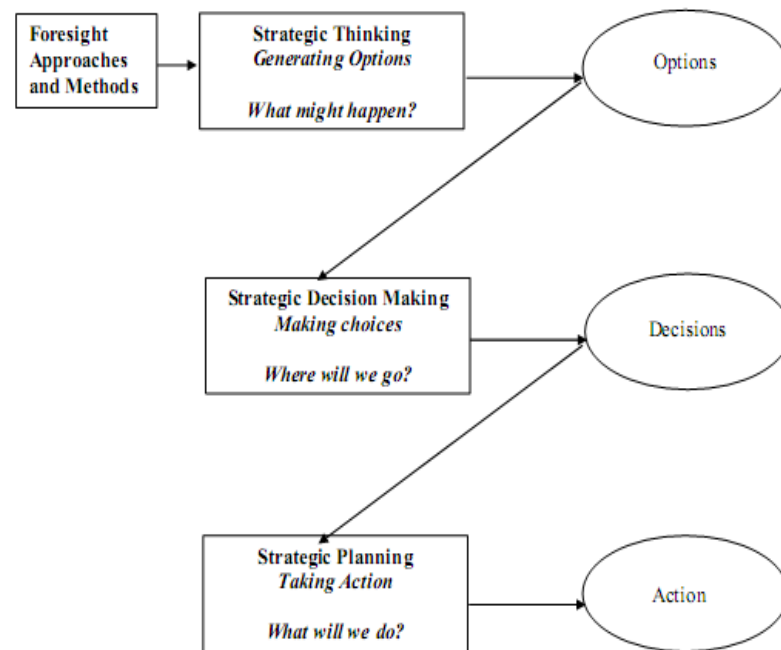
(2004 : 1) pendekatan memperkirakan masa depan ada pada tahap *thinking*, tetapi tahap ini menjadi terlihat jelas apabila *strategisc thinking*, *strategisc decision making*, dan *strategisc planning* atau implementasinya didefinisikan secara terpisah tapi saling berkaitan dan saling melengkapi antara bidang satu dan bidang lainnya.

Perencanaan strategis sangat dibutuhkan dalam pembangunan, perencanaan strategis bisa sangat penting karena sebuah organisasi bisa beresiko apabila strategis tersebut gagal atau tidak mengetahui perubahan pada lingkungan eksternal organisasi tersebut. Menurut Conway (2004:6) ada tiga proses untuk menentukan perencanaan strategis, yaitu *strategisc thinking*, *decision making*, dan *strategisc planning*. Yaitu:

1. *Strategisc thinking* merupakan bagaimana memprediksi masa depan dan kemudian membuat pilihan – pilihan yang menjadi pertimbangan kedepannya.
2. *Decision making*, yaitu tentang bagaimana memutuskan strategis mana yang akan diambil dan mengembangkan strategis tersebut kemudiann menentukan arah kemana strategis tersebut ditujukan.
3. *Strategisc planning* adalah tentang mengimplementasikan strategis yang ditentukan.

Ketiganya sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam menghadapi lingkungan strategis.

Berikut merupakan proses perencanaan strategis menurut Voros dan Conway (2004):



Gambar 3. Tiga Tingkat Kerangka “Strategisc Foresight”

Sumber: Conway (2004:7)

Konsep tersebut terlihat sangat sederhana dalam pandangan organisasi publik maupun swasta, tetapi kerangka ini membuat perencanaan strategis menjadi lebih jelas karena apa yang diramalkan dapat menjadi pertimbangan untuk pembuatan strategis yang berlanjut pada implementasi perencanaan strategis.

Berbeda dengan Conway, model perencanaan dari Bryson menyajikan pandangan yang lebih berwarna terhadap perencanaan strategis dan manajemen strategis di dalam organisasi – organisasi publik. Bryson berkeyakinan, bahwa penyebab gagalnya proses-proses perencanaan strategis pada organisasi-organisasi publik berakar pada asumsi yang keliru atas makna konsensus. Rencana – rencana

strategis di susun dan dilaksanakan dalam perspektif bahwa semua stakeholder siap sedia berbagai visi dengan tim perencana strategis. Suatu saat nanti dalam proses perencanaan atau bahkan terkadang tatkala baru memasuki tahap pengimplementasian, secara mendadak para stakeholder terkejut melihat perubahan yang tengah berlangsung berikut dampak yang ditimbulkan. Respon pertama yang diberikan stakeholder yang terkejut itu tentunya berupaya untuk segera menghentikan proses yang tengah bergulir itu dan menekan semua pihak yang terlibat untuk kembali bernegosiasi.

Sudah seringkali terbukti bahwa benturan kekuasaan seperti itu akan mengakibatkan serba terpuruknya proses perencanaan, atau dalam keadaan yang paling ekstrem menghantar pada pudarnya dalam jangka waktu yang lama akan momentum perubahan yang telah dikreasikan oleh para perencana strategis. Untuk mencegah skenario-skenario fatal seperti itu, maka Bryson (2007:55-70) membuat suatu model sepuluh langkah strategi, yang pijakannya bertolak dari keabsahan dimensi rasionalitas politik, agar demikian memungkinkan tiba pada konsensus mengenai isu-isu pokok strategis dan kemudian akan di identifikasikan pada pijakan kedua, yang akan dipersiapkan melalui pendekatan tujuan yang lebih tradisional sifatnya. Secara kongkretnya model tersebut akan dipilah menjadi sepuluh langkah kronologis Bryson (2007:55-70), sebagai berikut:

1. Bermula dari suatu proses dan lalu menjaganya agar memuat daya untuk proses di dalam maupun luar organisasi, yakni ;
 - a. Identifikasi pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam proses dan pihak-pihak tertentu yang harus bisa diajak terlibat untuk memoles proses dan

strategi akhir bagaimana yang hendak diraih. Dalam konteks ini suatu upaya analisis terhadap stakeholder merupakan perangkat yang paling cocok.

- b. Penetapan tujuan melalui analisi atas para stakeholder dimaksudkan untuk mencapai konsensus mengenai, tujuan dari proses tersebut, langkah-langkah yang bersifat kompromi, peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing didalam proses, dan peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing tim perencana, serta penggunaan dari sarana – sarana yang diperlukan untuk proses itu.
 - c. Bentuk suatu panita perencanaan strategis yang akan mengatur dan mengelola seluruh proses.
2. Mengidentifikasi wewenang dari organisasi, yakni :
 - a. Uraikan wewenang formal dari organisasi (perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan).
 - b. Uraikan wewenang informal dari organisasi (harapan-harapan implisit dari stakeholder).
 3. Perjelas misi serta nilai-nilai dari organisasi, yakni :
 - a. Identifikasi kebutuhan – kebutuhan sosial dan atau politik di mana organisasi akan bergerak lebih baik.
 - b. Terjemakan kebutuhan-kebutuhan yang telah teridentifikasi itu kedalam suatu alur terdepan dari penjabaran seputar penugasan ataupun misi organisasi.

- c. Gunakan informasi-informasi dalam upaya melakukan analisis terhadap para stakeholder, untuk menjadi bahan pertimbangan sewaktu merumuskan misi maupun nilai-nilai organisasi, dengan mencermati: 1. Siapakah sesungguhnya para stakeholder dari organisasi. 2. Apakah yang sebenarnya diharapkan oleh para stakeholder dan 3. Bagaimanakah penilaian dari para stakeholder terhadap jalanya organisasi.
- 4. Lakukan suatu analisis SWOT, yakni :
 - a. Uraikan keadaan lingkungan dari organisasi, sehingga dapat diidentifikasi hal-hal yang mungkin saja menjadi peluang-peluang maupun hambatan-hambatan bagi organisasi
 - b. Uraikan pula dinamika organisasi agar dapat mengidentifikasi kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan dari organisasi
 - c. Baurkan informasi-informasi yang diperoleh dari uraian atas lingkungan eksternal maupun internal, sehingga dapat teridentifikasi faktor-faktor kritikal apakah yang merupakan penentu kesuksesan bagi organisasi.
- 5. Identifikasi isu-isu krusial bagi strategi organisasi
 - a. Isu-isu krusial pada strategi adalah hambatan, fundamental, atau kritikal yang akan sangat berpengaruh dalam memformulasikan 1. Wewenang dari organisasi itu. 2. Misi dan nilai-nilai yang diemban organisasi. 3. Output dari organisasi 4. Para pelanggan pengguna dan pembeli dari organisasi 5. Anggaran pendanaan ataupun pengelolaan anggaran dari organisasi
 - b. Pemaparan yang lugas mengenai isu-isu tersebut perlu mencakup 3 fase dengan meruntut alur tematiknya 1. Suatu bahasan yang ringkas dari

permasalahan yang ada. 2. Suatu argumentasi yang jelas mengapa hal ini terkait dengan isu-isu yang strategis. 3. Suatu ikhtisar yang mengungkapkan dampak bagi organisasi apabila isu itu tidak direspon secara benar atau proposional

6. Rumuskan strategi-strategi untuk mengendalikan isu-isu krusial tersebut. Ada beberapa tehnik yang memungkinkan diterapkan yakni

1. Proses pengembangan strategi lima langkah (spencer, 1989) yang mengacu pada lima pertanyaan sebagai berikut.

- a) Apakah opsi yang dipilih sudah tepat sasaran, visi dan harapan yang telah disusun sebelumnya mampu menghadapi isu krusial yang telah muncul, kandungan maksud dan tujuan apapun visi utamanya.
- b) Di manakah letak kendala-kendala yang merintang pelaksanaan dari opsi-opsi, harapa-harapan maupun visi misi ini.
- c) Ide-ide manakah yang dapat dipergunakan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang teridentifikasi itu.
- d) Manuver-manuver jangka menengah dan panjang manakah yang seyogyanya diperlukan untuk dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut secara kongkrit berkisar sampai 1-2 tahun.
- e) Manuver-manuver jangka pendek manakah yang seyogyanya diperlukan untuk dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut secara kongkrit (berkisar sampai 6- 1 tahun)

2. Proses pengembangan SODA (yang mencakup analisis pengembangan pilihan strategi) yang secara sistematis yang menggambarkan sebab akibat

yang diwujudkan dalam tahapan diagram dari berbagai aktifitas yang diperlukan dalam mengelola isu-isu yang timbul

7. Pelajari kembali strategi-strategi yang telah dirumuskan dan tingkatan konsensus, yakni
 - a. Strategi-strategi yang dikembangkan itu patut terus dikaji dan pertimbangkan dengan hati-hati.
 - b. Strategi-strategi yang sudah direvisi akan diajukan kepada pihak-pihak internal (dan eksternal), di mana mereka yang kelak akan memutuskan untuk memberikan persetujuan
8. Bentangkan suatu “visi menebar kesuksesan” bagi organisasi, yakni
 - a. Mengembangkan suatu misi yang memperjelas, bagaimanakah seharusnya keberadaan organisasi itu, serta akan berfungsi sebagai bagaimana apabila strategi-strategi yang dirumuskannya telah berhasil dilansir
 - b. Uraikan sejauh manakah suatu visi yang jelas dapat merupakan faktor katalisator untuk kemandirian pengelolaan maupun pengaturan (pengambilan keputusan secara otonom berikut pemberdayaannya) dalam hal mekanisme pengorganisasiannya.
9. Bentangkan suatu rencana pengimplementasian yang efektif, yakni
 1. Tentukan aktivitas-aktivitas pengimplementasian yang memang diperlukan
 2. Terjemahkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan itu ke dalam suatu rencana kegiatan, di mana rancangan kegiatan tersebut akan merinci mengenai

- a. Pemrakarsa pengimplementasian serta pertanggung jawaban dari para pengawas yang terkait, secara berkelompok maupun perorangan
 - b. Sasaran-sasaran spesifik, hasil-hasil yang diharapkan berikut ruang lingkupnya
 - c. Langkah-langkah spesifik disertai rincian – rincian yang relevan
 - d. Jadwal waktu
 - e. Sarana-sarana yang dibutuhkan berikut sumber-sumbernya
 - f. Proses komunikasi
 - g. Prosedur-prosedur rutin berikut pandanganya
 - h. Prosedur-prosedur akunting yang sah (akuntabilitas).
3. Meskipun terdapat sifat karakteristik yang formal dan sistematis dalam tahapan ini, namun harus selalu diperhitungkan akan peran dan manfaat dari strategi-strategi yang muncul kemudian (yang dititipkan dan oportunistik)
10. Evaluasi strategi-strategi serta proses-proses strategi yang saling berselingan waktunya, kemudian berikan pedoman, yakni evaluasi dan apabila dirasa perlu berikan pedoman seputar :
- a. Faktor-faktor yang tercakup dalam strategi, dan/atau lengkapi lagi.
 - b. Proses-proses dari perumusan strategi.
- Menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

E. Stakeholder

Stakeholder adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positive atau negative) oleh suatu kegiatan program pembangunan” Hertifah (2003, h.29). Hal serupa juga dikemukakan oleh Scheemer (2000) yang menyebutkan “*Stakeholders in a process are actors persons, groups or organizations with a vested interest in the policy being promoted*”. Sedangkan Gonsalves et al. yang dikutip oleh Iqbal (2007:90) mendeskripsikan stakeholder sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat. Menurut Nugroho (2014:16-17) stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu:

- a. Policy creator, stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
- c. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. Implementer, stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Definisi stakeholder menurut Freeman dan Reed (2009:4) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Freeman menjelaskan Stakeholder sebagai individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi

oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Bryson (2001:60), stakeholder didefinisikan sebagai orang, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian, sumber daya, atau hasil (output) organisasi, atau dipengaruhi oleh hasil itu.

Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta, dkk (2008:46) yaitu mempunyai:

- a. Kekuasaan,
- b. Legitimasi,
- c. Kepentingan terhadap perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan di dalam suatu program atau kegiatan tertentu yang melibatkan dirinya.

Kasali dalam Hadi (2001: 104) membagi stakeholder menjadi sebagai berikut:

1. Stakeholder Internal dan stakeholder eksternal
Stakeholder internal adalah stakeholder yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder). Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing partner dan lain-lain.
2. Stakeholder primer, skunder dan marjinal
Tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholder yang paling penting disebut stakeholder primer, stakeholder yang kurang penting disebut

stakeholder skunder dan yang biasa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. Stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan
Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholder tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholder masa depan adalah stakeholders pada masayang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.
4. *Proponents, opponents, dan uncommitted*
Diantara stakeholder ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal stakeholder yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.
5. Silent majority dan vokal minority.
Dilihat dari aktivitas stakeholder dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

Dalam kaitannya dengan pengembangan minapolitan di desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, jelas bahwa stakeholder yang terlibat meliputi: Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Kabupaten Gresik, Sektor Swasta, dan Masyarakat. Yang ketiganya mempunyai peran yang berbeda-beda. Kemudian sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kasali dalam Wibisono (2007: 90), penulis membagi/membuat skala prioritas terhadap stakeholder-stakeholder tadi menjadi stakeholder primer, skunder, dan marginal.

Terdapat banyak definisi mengenai *governance* yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda satu sama lain. *Governance* menurut definisi dari sedarmiyanti (2003:2) proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance*

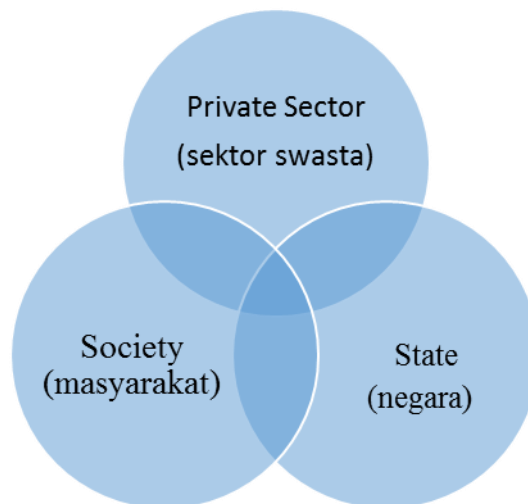
(pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek Sedangkan menurut Sumarto (2003:2), *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Tjiptoherijanto dalam Azhar (2013:2) mendefinisikan *Good Governance* dari sudut pandang harapan aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yang menyatakan bahwa *Good Governance* adalah tata kelola yang berupaya memenuhi harapan-harapan pihak yang terlibat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlibatan para stakeholder, maka pengambilan keputusan dalam pelayanan publik akan mendapatkan pertimbangan yang matang dan semua keinginan para stakeholder akan tercapai.

Sedarmayanti (2009: 280) mengungkapkan, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Negara/pemerintahan: Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal
- c. Masyarakat madani Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan

perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.



Gambar 4. Hubungan Antar Sektor dalam Governance

Sumber: Sedarmayanti (2009:280)

Hal tersebut mengartikan bahwa dalam *governance* terdapat interaksi dalam ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan. Dengan adanya interaksi antar stakeholders tersebut berarti ada kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan proses dari penyelenggaraan pemerintahan yang elemennya mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sedangkan *good governance* merupakan wujud terbaiknya yang mencakup keterpaduan antara ketiganya, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

F. Minapolitan

1. Konsep Minapolitan

Konsep minapolitan pada pertengahan tahun 1970an Friedmann dalam Wiadnya (2011) mencetuskan konsep pengembangan kota kecil sebagai pusat dan ditunjang oleh beberapa wilayah desa di sekitarnya dengan sektor penggerak ekonomi dari pertanian. Teori ini dipandang sebagai solusi untuk menarik aglomerasi urban dari wilayah metropolitan. Namun agropolitan dirancang pada kapasitas daya dukung tertentu, dengan ukuran kota kecil. Setelah daya dukung terlewati, kawasan agropolitan menjadi tidak ekonomis dan urbanisasi diharapkan akan berhenti. Singkatnya, dimensi agropolitan ketika itu dibayangkan sebagai kota kecil (ukuran penduduk sekitar 10 – 25 ribu jiwa), ditambah beberapa wilayah kecamatan di sekitarnya (pada radius *commuting*) dengan jarak sekitar 5 – 10 km dari pusat kota. Komoditas utama untuk menggerakkan ekonomi wilayah ialah sektor pertanian. Dengan demikian, suatu kawasan agropolitan akan berdimensi penduduk antara 50 – 150 ribu jiwa. Pada wilayah pesisir, konsep agropolitan diadopsi dengan penggerak ekonomi dari sektor perikanan. Kepadatan penduduk di wilayah pesisir umumnya lebih padat dibandingkan dengan wilayah di atasnya yang berbasis pertanian. Oleh karena itu dimensi ruang pada minapolitan bisa sedikit berbeda dengan agropolitan.

Menurut Wiadnya (2011) konsep minapolitan pada dasarnya hampir sama agropolitan, perbedaan mendasar terletak pada sektor penggerak ekonomi dari perikanan. Minapolitan sebaiknya dirancang untuk menumbuhkan kota-kota kecil mandiri dan mengurangi penumpukan penduduk di kota-kota besar. Minapolitan

tidak selalu harus mulai dari awal. Selanjutnya Wiadnya (2011) juga menyatakan minapolitan merupakan proses yang dinamis dan siklik dengan karakteristik dasar multi-sektor secara terpadu. Setiap tahapan rencana aksi dibuat melekat dengan rencana yang ada saat ini. Implementasi dari minapolitan harus selalu di evaluasi (melalui alat monitoring) untuk mengukur setiap keberhasilan atau bahkan kegagalan program. Hasil dari monitoring harus bisa digunakan sebagai dasar bagi pengelola untuk memperbaiki setiap rencana aksi (implementasi) berikutnya.

Pada proses minapolitan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu minapolitan perikanan tangkap dan minapolitan perikanan budidaya. Kedua jenis aktifitas ekonomi ini memiliki dimensi keruangan yang berbeda. Produksi bahan mentah pada sistem penangkapan ikan dilakukan secara terpusat di tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Aktifitas pengolahan (pabrik es, lahan pengeringan, pengalengan) bisa dirancang pada lokasi dekat dengan pendaratan ikan. Pada minapolitan budidaya. Aktifitas budidaya dilakukan secara tersebar dan banyak menjadi satu dengan lahan perumahan penduduk.

2. Dasar Hukum Minapolitan

Berdasarkan amanat uud 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 maka pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan yang berupa Peraturan Menteri dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan laut maupun air tawar dengan menggunakan konsep minapolitan. Regulasi tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman atau landasan dalam melaksanakan program yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 12 tahun 2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

3. Prinsip Minapolitan

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 35 tahun 2013 telah ditetapkan 179 Kabupaten/Kota di Indonesia dan 202 Lokasi sebagai kawasan Minapolitan yang terdiri dari 145 kawasan berbasis Perikanan Budidaya dan 57 kawasan berbasis Perikanan Tangkap. Kawasan tersebut diprioritaskan mendapat dukungan kegiatan dan anggaran sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan telah dilakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan konsep Minapolitan dengan baik, diantaranya dengan melakukan rapat koordinasi di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan, Pemerintah daerah, lintas Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat dan swasta. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan. Dalam perkembangannya, konsep pengembangan kawasan Minapolitan telah diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan industrialisasi

kelautan dan perikanan dengan pendekatan *Blue Economy* dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan pemasaran dengan keaneragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu. Unit produksi, pengolahan, dan pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan memasarkan suatu produk atau jasa.

Konsep minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efesien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi, pertama prinsip terintegrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha, maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik. Kedua, prinsip efesiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Ketiga, prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem

produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif. Keempat, prinsip berakselerasi tinggi mengandung pengertian bahwa percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari Negara-negara kompetitor, melalui *market share* produk kelautan dan perikanan Indonesia ditingkat dunia.

4. Tujuan dan Sasaran Minapolitan

Tujuan dan sasaran pengembangan kawasan minapolitan secara lengkap disebutkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman umum minapolitan. Namun secara esensial, sasaran program minapolitan bisa disarikan menjadi 4 (empat) hal utama sebagai berikut: Pelayanan secara terpadu dan efisien dari instansi pusat dan daerah serta instansi lintas-sektor pada kawasan minapolitan; Berkembangnya sektor ekonomi dari komoditas sektor perikanan Kawasan sentra minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh sebagai kota mandiri Pengisian tenaga kerja pada wilayah sekitar sentra minapolitan sesuai dengan kapasitas daya dukung produksi perikanan. Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan

- c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - 1. Penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - 2. Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - 3. Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - 4. Pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
 - 5. Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- e. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - 1. Deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - 2. Pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - 3. Penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif barriers);
 - 4. Pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
 - 5. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.

- f. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
1. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 2. Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 3. Revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 4. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.